

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

MODEL PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN GORONTALO UTARA

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

BUDI HARTONO
NIM : 710 519 004

Disetujui dan Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fence M. Wantu, SH., MH
NIP. NIP. 19740119 200112 1 001


Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH
NIP. 19810306 200812 2 001

Gorontalo, November 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

MODEL PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

BUDI HARTONO
NIM : 710 519 004

Disetujui dan Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Magister pada Program Studi Ilmu Hukum

Menyetujui:

Pembimbing I


Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH
NIP. NIP. 19740119 200112 1 001

Pembimbing II


Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
NIP. 19810306 200812 2 001

Gorontalo, November 2021

Mengetahui


Dektor Pascasarjana
Universitas Negeri Gorontalo

Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 19591227 198603 2 003

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

MODEL PENGAWASAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

TESIS

Disusun dan Diajukan oleh :

BUDI HARTONO
NIM : 710 519 004

Telah Disetujui dan Disahkan oleh
Panitia Tesis pada Tanggal November 2021

KOMISI PENGUJI:

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH NIP. 19741223 200312 2 011	Ketua Program Studi/ Ketua	
2. Dr. Fence M. Wantu, SH., MH NIP. 19740119 200112 1 001	Pembimbing I	
3. Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH NIP. 19810306 200812 2 001	Pembimbing II	
4. Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH., M.Hum NIP. 19680409 199303 2 001	Pengaji I	
5. Dr. Duke Arie Widagdo, SH., MH., CLA NIDN. 912127604	Pengaji II	

Gorontalo, November 2021

Mengetahui



Prof. Dr. Asna Aneta, M.Si
NIP. 19591227 198603 2 003

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH., MH
NIP. 19741223 200312 2 011

ABSTRAK

BUDI HARTONO. NIM. 710519004. 2021. *Model Pengawasan Bawaslu Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.* Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Pembimbing I Dr. Fence M. Wantu, SH., MH. Pembimbing II Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi penegakan hukum netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018, untuk mengetahui dan menganalisis model pengawasan Bawaslu terhadap pengawasan netralitas aparatur sipil negara pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2018.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Data dikumpulkan dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu penegakan hukum terhadap pelanggaran netralitas aparatur sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 yaitu dilakukan dengan cara melakukan tindakan pencegahan pelanggaran berupa sosialisasi netralitas ASN dan melakukan penindakan pelanggaran melalui mekanisme temuan dan laporan dugaan pelanggaran dengan cara menerima laporan, menerima informasi awal dan melakukan investigasi; registrasi laporan, temuan, melakukan proses klarifikasi dan kajian; serta penerusan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang. Bentuk pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 terkait pencegahan terjadinya pelanggaran netralitas ASN yaitu meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung melalui kegiatan sosialisasi kepada ASN yang dilakukan oleh Bawaslu bersama jajarannya. Model pengawasan netralitas ASN yang efektif yaitu melakukan kerjasama dengan pihak terkait (Inspektorat, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Komunikasi dan Informatika untuk bersama-sama melakukan sosialisasi kepada ASN; melakukan pencegahan dini dengan identifikasi potensi-potensi pelanggaran netralitas ASN; dan memperkuat aturan hukum melalui pemberian sanksi pidana dan disiplin.

Kata Kunci: Model, Pengawasan, Netralitas, Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

BUDI HARTONO. STUDENT ID NUMBER. 710519004. 2021. *The Supervision Model of The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) on Neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in the Local Elections of Gorontalo Utara Regency.* Thesis. Postgraduate Law Studies Program, State University of Gorontalo. The principal supervisor is Dr. Fence M. Wantu, SH., MH and the co-supervisor is Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.. MH.

This research aims at identifying and analyzing the law enforcement on the neutrality of ASN in the 2018 local elections of Gorontalo Utara Regency, as well as identifying and analyzing the supervision model of Bawaslu on the neutrality of ASN in the 2018 local elections of Gorontalo Utara Regency.

This research is classified into sociological or empirical types using a qualitative approach. The data sources are obtained from the chair and members of Bawaslu of Gorontalo Utara Regency. Techniques of data collection are observations, interviews, and documents. Technique of data analysis is qualitative.

Findings reveal that the law enforcement against violations of the neutrality of ASN during the 2018 local election was carried out by taking preventive actions in the form of disseminating about the neutrality of ASN along with taking actions through finding and reporting the alleged violations by receiving reports, receiving initial information and conducting investigations; registering the reports, findings, conducting clarification and reviewing; and forwarding the alleged violations to the authorized agency. The supervision conducted by Bawaslu of Gorontalo Utara Regency in the 2018 local election was in the form of direct and indirect supervisions, such as conducting outreach to ASN. The effective monitoring model on the neutrality of ASN is to collaborate with related parties (Inspectorate, Education and Training Agency, Department of Communication and Informatics in Public Information Service) to hand in hand disseminate the information; conduct prevention by identifying potential neutrality violations of ASN, and strengthen the law through the provision of criminal sanctions and discipline.

Keywords: Model, Supervision, Neutrality, State Civil Apparatus

